

**KEABSAHAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM (RUPS) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DALAM
KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN OLEH NOTARIS KEPADA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

TESIS



Disusun oleh:

JULIO OMEGA SAKTI

2220123024

Dosen Pembimbing:

Dr.Dian Bakti Setiawan, SH.,MH (Pembimbng I)

Dr. Yussy Adelina Mannas, SH.,MH (Pembimbing II)

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

**KEABSAHAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM (RUPS) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DALAM
KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN OLEH NOTARIS KEPADA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

*Julio Omega Sakti, 2220123022, Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2025*

ABSTRAK

Permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar dan apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, maka permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menkumham sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (7). Peraturan Menteri ini hanya menjelaskan akibat keterlambatan pendaftaran akta berita acara RUPS kepada Menteri adalah perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan namun tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai akibat hukumnya terhadap Perusahaan tersebut serta upaya dalam mengatasi keterlambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perpustakaan. Hasil Penelitian adalah Perseroan Terbatas lalai dalam melaporkan perubahan data yang ada dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut, jika perubahannya adalah perubahan anggota direksi dan dewan komisaris dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut Akta perubahan yang ada meskipun tetap berkedudukan sebagai akta autentik namun akta tersebut tidak memenuhi asas publikasi sehingga rawan mengandung perbuatan melawan hukum. Dalam pembuatan akta penegasan harus memperhatikan Bahwa antara sejak tanggal akta dibuat sampai akta penegasan jika terjadi tindakan hukum yang merugikan atau menguntungkan para penghadap menjadi tanggung jawab penghadap sepenuhnya.

Kata Kunci: Keabsahan Akta, Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris

**VALIDITY OF THE DEED OF MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (GMS) CONCERNING CHANGES TO THE ARTICLES OF
ASSOCIATION IN THE DELAY OF NOTIFICATION BY THE NOTARY TO THE
MINISTRY OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Julio Omega Sakti, 2220123022, Master Of Notary Law,

Faculty of Law, Andalas University, 2025

ABSTRACT

The application for approval and notification of changes to the Articles of Association shall be submitted to the Minister within a period of 30 (thirty) days from the date of the Notarial deed containing the changes to the Articles of Association. If the 30 (thirty) day period has passed, then the application for approval and notification of changes to the Articles of Association cannot be submitted to the Minister of Law and Human Rights as stipulated in Article 18 paragraph (7). This Ministerial Regulation only explains the consequence of the delay in registering the minutes of the General Meeting of Shareholders with the Minister, which is that changes to the Articles of Association cannot be submitted, but does not further explain its legal consequences for the Company or efforts to remedy such delays. This study uses the Normative juridical method, utilizing secondary and primary data, with legal research and library approaches as the data collection tools. The research findings indicate that the Limited Liability Company failed to report changes in data within the prescribed period set by the competent authority, which is 30 (thirty) days from the date of such changes. This applies to changes in board members and commissioners, and within 30 (thirty) days from the date of the Notarial deed containing changes to the Articles of Association. Despite the existing amendments being authentic deeds, they do not meet the publication principle, thus making them susceptible to illegal actions. In creating notarial deeds, it is crucial to note that from the date the deed is made to the notarial certification, any legal actions detrimental or beneficial to the parties involved are entirely the responsibility of those parties."

Keywords: *Validity of Deeds, General Meeting of Shareholders, Notary*